

***FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK
DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN

NIM : 2018010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2022**

***FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK
DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
NIM : 2018010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

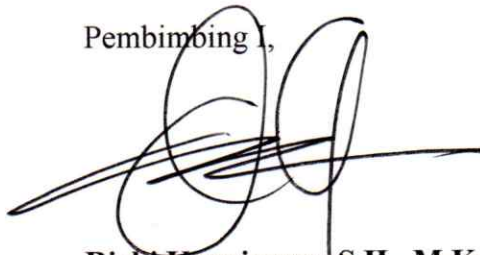
Judul Skripsi : **FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK
DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Nama : MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN

N I M : 2018010018

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,

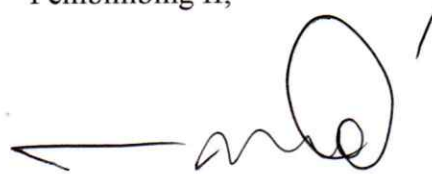


Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

Gresik,

Pembimbing II,

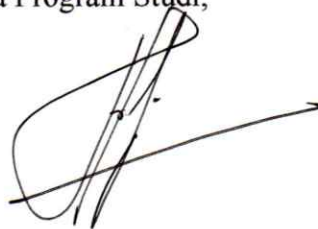


Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.

NIPY : 10710202012003

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN**
2. N.I.M : 2018010018
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penelitian		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 10710202012003

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

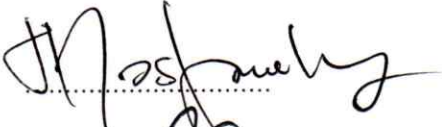

Judul Skripsi. : **FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK
DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI
INDONESIA**

NAMA : MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
N.I.M : 2018010018

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126
Ketua.
2. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.
3. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.


.....

.....
fiss
.....

Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
NIM : 2018010018
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : *FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK
DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
NIM : 2018010018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
NIM : 2018010018
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

*“FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU
KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI
INDONESIA”*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 5 Agustus 2022

Yang menyatakan



MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN
NIM : 2018010018

MOTTO

**SEGENGAM KEKUASAAN LEBIH EFEKTIF DARI
PADA SEKERANJANG PERATURAN
(BAHARUDDIN LOPPA)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekotku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan

kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“*FORCE MAJEURE* SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2018 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 5 Agustus 2022

Penulis,



MUHAMMAD FIKI ZAINUDIN

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu memenuhi dan/atau lalai untuk melakukan kewajiban prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat bersama pihak kreditur. Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu: 1) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*); dan 2) Karena kesalahan pihak debitur, baik karena suatu kesengajaan maupun lalai. "Secara istilah *Force Majeur* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *Overmacht; act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia".

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah bagaimana bentuk klausula keadaan darurat (*force majeure*) dalam sebuah perjanjian. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana pengaturan keadaan darurat (*force majeure*) menurut hukum perdata di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan prespektif mengenai rumusan masalah yang diajukan terkait dengan pengkajian mengenai *force majeure* sebagai alasan tidak dilaksanakan suatu kontrak ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia.

Di dalam KUHPerdata tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan pengertian *force majeure*, sehingga untuk menafsirkan istilah *force majeure* dalam KUHPerdata dapat diartikan bahwa pengaturan mengenai *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama) diambil dari kesimpulan-kesimpulan, teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Pengaturan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1244 dan Pasal 1255. Namun ada juga beberapa Pasal selain yang sudah disebutkan sebelumnya yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* yaitu Pasal 1545, Pasal 1553, Pasal 1444, Pasal 1445, dan Pasal 1460 KUHPerdata.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* pada Pasal 1245 KUHPerdata tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Dan saran yang dapat diberikan bahwa kondisi *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Karena suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Kata Kunci : *Force Majeure*, Kontrak, Perdata.

ABSTRACT

Default is a condition in which the debtor is unable to fulfill and/or neglects to perform its performance obligations that have been determined in the agreement made with the creditor. Default can occur due to 2 (two) possibilities, namely: 1) Force majeure; and 2) Due to the debtor's fault, either intentionally or negligently. "In terms of Force Majeur in an agreement, it is often referred to as Overmacht; act of god, coercion, emergency, force majeure, circumstances beyond human capability".

In writing this research, the writer raised two problems. The first problem is how to form an emergency clause (force majeure) in an agreement. And the second problem is how to regulate the state of emergency (force majeure) according to civil law in Indonesia. In this research, the author uses normative legal research methods, to find the rule of law, legal principles and legal doctrines. The results of this study provide a perspective on the formulation of the problem proposed in relation to the study of force majeure as the reason for not implementing a contract from the perspective of civil law in Indonesia.

In the Civil Code there are no general juridical standards that can be used in interpreting the meaning of force majeure, so to interpret the term force majeure in the Civil Code it can be interpreted that the arrangements regarding force majeure contained in the regulation on compensation, or risk arrangements due to force majeure for contracts unilaterally or in the part of special contracts (named contracts) drawn from conclusions, legal theories about force majeure, doctrine and jurisprudence. Regulations regarding force majeure are contained in the Civil Code (KUHPerdata) in Article 1244 and Article 1255. However, there are also several articles other than those previously mentioned that can be used as guidelines for force majeure, namely Article 1545, Article 1553, Article 1444, Article 1445, and Article 1460 of the Civil Code.

The conclusion in this study is that the cancellation of the contract in a state of force majeure in Article 1245 of the Civil Code states that compensation for losses and interest can be forgiven when a compelling situation occurs. However, the parties who have entered into a contract/agreement must be able to prove that there are obstacles that really cannot carry out their achievements. And the advice that can be given is that the force majeure condition does not automatically become the cancellation of a contract, but renegotiation can be carried out to cancel or change the contents of the agreed contract, of course, it is hoped that it will run in good faith. Because a contract must continue to be carried out in accordance with its contents in accordance with the provisions of Article 1338 of the Civil Code.

Keywords: Force Majeure, Contract, Civil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.5.1. Landasan Konseptual.....	12
1.5.2. Landasan Yuridis.....	19
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Jenis Penelitian.....	21
1.6.2. Metode Pendekatan	22
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.7. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KLAUSULA KEADAAN DARURAT (<i>FORCE MAJEURE</i>) DALAM SEBUAH PERJANJIAN	
2.1. Pengertian Keadaan Darurat Secara Hukum Di Indonesia.....	28
2.2. Fungsi Klausula Keadaan Darurat Dalam Sebuah Perjanjian.....	35
2.3. Keadaan Darurat (<i>Force Majeure</i>) Ditinjau Dari Keppres Nomor 12 Tahun 2020.....	37
2.4. Bentuk Klausula Keadaan Darurat (<i>Force Majeure</i>) Dalam Sebuah Perjanjian.....	44

**BAB III PENGATURAN KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)
MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

3.1. Faktor Yang Dapat Dijadikan Sebagai Sebab Adanya Pembatalan Perjanjian Di Tinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdato.....	51
3.1.1. Tentang Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.....	54
3.1.2. Tentang Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.....	56
3.1.3. Tentang Pokok Persoalan Tertentu.....	58
3.1.4. Tentang Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.....	59
3.2. Akibat Hukum Keadaan Darurat (<i>Force Majeure</i>) Dalam Sebuah Perjanjian.....	60
3.3. Upaya Hukum Yang Ditempuh Jika Para Pihak Ada Yang Membatalkan Sebuah Perjanjian Karena Keadaan Darurat (<i>Force Majeure</i>).....	67

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA